

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan Mempedomani RKPD tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n-1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, diawali dengan membuat SK Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah (terlampir) dengan menjabarkan Fungsi dari masing-masing Tim sesuai Tugas dan Fungsinya. Tim Penyusunan Renja ini terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan Sekretariat yang bertugas membuat dan menyusun Renja sesuai arahan dan rekomendasi dari Tim Penyusunan Renja.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021 dilakukan penyamaan persepsi teknis pada masing-masing Bidang dan UPTD sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam kegiatan awal penyusunan akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota dengan memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Kab/Kota yang telah diakumulasikan dalam usulan program/kegiatan yang ada pada masing-masing Kab/Kota. Terutama dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Sosial RI. Dengan mempertimbangkan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2021.

Untuk penetapan Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan sehingga Program/Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat diusulkan dalam RAPBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang nantinya Renja tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Agenda Kerja Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021

Agenda Penyusunan	Tahapan Penyusunan Renja (Bulan)							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pembentukan Tim Renja dan Pengumpulan data dan Informasi								
Rancangan Awal Renja dan Orientasi Renja								
Rapat dengan Kab/Kota								
Penyempurnaan Renja								
Verifikasi Renja								
Rancangan Akhir								
Agenda Penyusunan	Tahapan Penyusunan Renja (Bulan)							
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Penyempurnaan dan Penetapan Renja Perangkat Daerah								

### 1.2 Landasan Hukum

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
8. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tanggal 5 Februari 2018.
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya APBD Tahun Anggaran 2018
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
25. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/652/XII/REN.MAKRO/Bappeda-2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.
26. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 954/161/SK/APBD/DINSOS/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Penetapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

### **Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Sistematika Penulisan
2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
  - b. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

c. Program dan Kegiatan

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5. BAB V PENUTUP

LAMPIRAN TABEL

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

##### a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2019 (sampai Semester I Tahun 2019) dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2019 (sampai Semester I Tahun 2019) telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp 98.601.974.870,- dipergunakan untuk membiayai 15 program dan 115 jenis kegiatan. Secara pencapaian target dan realisasi anggaran yaitu untuk keuangan sebesar 20,75% dan fisik sebesar 21,31%.

Dalam pencapaian terhadap hasil evaluasi LAKIP yang disusun telah sesuai dengan yang diharapkan dimana dalam target RPJMD hasil evaluasi LAKIP untuk Tahun 2018 Dinas Sosial mendapat hasil B dengan menyesuaikan terhadap capaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.

##### b. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut :

##### a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2018.

Dari 14 Program dan 116 kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan yang sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% dan masih belum maksimal yaitu dibawah 95%. Adapun program/kegiatan yang sudah mencapai diatas 95% meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 95,34%
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 97,19 %
- Program Pembinaan Anak terlantar sebesar 99,07%
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma sebesar 99,77%
- Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo sebesar 99,84%
- Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) sebesar 99,94%
- Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebesar 97,97%
- Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba sebesar 95,80%

Sedangkan untuk program yang masih pencapaian dibawah 95% adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 93,83%
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 90,01%
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 91,00%
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar 93,19%
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sebesar 92,48%
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya sebesar 86,79%.

- b. Perkiraan capaian tahun 2019 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2019.
- c. Belum tercapainya program/kegiatan karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra serta pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal.
- d. Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran

program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

c. Kaitan Target Renstra Dinas Sosial dengan Capaian Realisasi Program/Kegiatan

Dalam pencapaian Target Renstra Tahun 2018 sudah mencapai hasil yang maksimal dimana tingkat pencapaian di atas 92%. Ada pencapaian yang kurang maksimal tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang tidak berjalan maksimal sehingga mengurangi pencapaian secara keseluruhan diantaranya kegiatan :

- Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan (66,66%)
- Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional (83,82%)
- Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) (86,09%)

Dapat di lihat dalam lampiran pada tabel T-C.29

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

Untuk bidang sosial standar pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana skala Provinsi

Berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka capaian kinerja berdasarkan SPM bidang sosial tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja SPM	Pencapaian SPM (%) 2017				Pencapaian SPM (%) 2018			
			Populasi (Org)	T (Org)	R (Org)	Capaian (%)	Populasi (Org)	T (Org)	R (Org)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	17.275	618	618	3.58	17.233	722	722	4.19
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	17.201	5.471	5.471	31.81	17.639	4.269	4.269	24.20
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Persentase (%) Lanjut Usia yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	41.259	220	220	0.53	40.653	229	229	0.56
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	11.791	0	0	0	25.979	0	0	0

Dalam tabel diatas bahwa untuk pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bisa dicapai dengan maksimal. Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restrukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif, strategi pemanfaatan SDM yang tepat dan manajemen pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya.

Untuk lebih terinci dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (Thn n-3)	Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n-1)	Tahun 2019 (Thn n)	Tahun 2020 (Thn n+1)	Tahun 2016 (Thn n-3)	Tahun 2017 (Thn n-2)	Tahun 2018 (Thn n1-)	Tahun 2019 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	11	12	13
<b>A</b>	<b>Anak Terlantar</b>													
	1 Pelatihan dan Keterampilan Anak Terlantar Putra dalam Panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	160 org	
	2 Pelatihan dan Keterampilan Anak Terlantar Putri dalam Panti (PSBR Harapan Padang Panjang)	80%	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	210 org	210 org	210 org	210 org	
	3 Pengurus panti sosial swasta		120 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	125 org	
	4 Pendamping anak terlantar		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	55 org	55 org	55 org	55 org	
<b>B</b>	<b>Lanjut Usia Terlantar</b>													
	1 Pelayanan dan Pemberian Keterampilan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti (PSTW Sabai Nan Aluih dan PSTW Kasih Sayang Ibu)	60%	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	180 org	
	2 Pendamping sosial lanjut usia		33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	33 org	
<b>C</b>	<b>Penyandang Cacat</b>													
	1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penyandang Cacat dan Eks Trauma Dalam Panti (PSBN Tuah Sakato)	60%	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	
	2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma dalam panti (PSBG Harapan Iabu)	60%	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	
	3 Pendamping sosial penyandang cacat berat	60%	22 org	22 org	22 org	25 org	25 org	25 org	22 org	25 org	25 org	25 org	25 org	
	4 Rujukan bagi penyandang Eks Psikotik		27 org	100 org	100 org	100 org	100 org	100 org	27 org	25 org	25 org	25 org	25 org	
	5 Pelatihan penyandang cacat potensian		20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	20 ODK	25 ODK	25 ODK	25 ODK	25 ODK	

D	Penyanggah Penyakit Sosial													
1	Pelayanan, pendidikan dan keterampilan dalam panti (PSKW Andam Dewi Solok)	60%	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org							
2	Eks Korban NAPZA	60%	20 org	20 org	-	-	-	-	20 org	25 org	25 org	25 org	25 org	
3	Siswa / pelajar yang mendapatkan penyuluhan NARKOBA	60%	70 org	70 org	70 org	-	-	-	70 org	100 org	100 org	100 org	100 org	

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	11	12	13
<b>E</b>	<b>Anak Asuh</b>												
1	Anak asuh putra dalam panti (PSABR Budi Utama Lubuk Alung)	80%	75 org										
2	Anak asuh putri dalam panti (PSAA Tri Murni Padang Panjang)	80%	100 org										
<b>F</b>	<b>Keluarga Miskin</b>												
1	Keluarga rentan yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	80%	525 KK	400 KK	440 KK	440 KK	440KK	440KK	400 KK	440 KK	440 KK	440 KK	440 KK
2	Panti Swasta Se Sumatera Barat	80%	4000 Anak										
3	Masyarakat terasing yang mendapatkan bimbingan keterampilan	80%	30 KK	30 KK	30 KK	30 KK	35 KK	35 KK	30 KK	35 KK	35 KK	35 KK	35 KK
4	Pekerja Migran Bermasalah	80%	69 org										
<b>G</b>	<b>Bencana Alam</b>												
1	Masyarakat yang tinggal dikawasan bencana	80%	-	50 org	55 org								
<b>H</b>	<b>Kelembagaann Sosial</b>												
1	FK Karang Taruna dan Pengurus		1 keg	8 keg	-	-	-	-	1 keg				
2	Pengelola WKSBM		40 org										
3	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial		24 PMKS										

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan penjabaran operasional dari RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 pada Prioritas 8 yaitu Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, telah melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Hubungan Sinergi		
		APBD	APBN	Kab/Kota
1	Program Pembinaan Anak Terlantar	360 org/tahun	240 anak	
2	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	150 org/tahun	360 orang	
3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	180 org/tahun dan 175 org/tahun	140 orang	
4	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	40 org/tahun	205 orang	
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	15.890 org/tahun	3910 KK	
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam	15 KK/tahun	280 orang	

- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota. Untuk menentukan jumlah sasaran pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

2. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mulai dari Perencanaan sampai penganggaran belum maksimal.

Hambatan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan adalah :

1. Perubahan kewenangan yang membuat Perangkat Daerah harus menyesuaikan kembali Program/Kegiatan
2. Keterbatasan anggaran yang ada membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat dalam pencapaian target dan sasaran.
3. Kurangnya dukungan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target dan sasaran sehingga tidak sinkronnya Program/Kegiatan yang ada di Provinsi dan Kab/Kota.

- c. Dampak program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah adalah: Sesuai dengan Prioritas 8 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yaitu : **“Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal “** , berdasarkan data penanganan kesejahteraan sosial yang telah di berdayakan dari tahun 2010 s./ d 2015 adalah :

APBD

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Terlantar (dalam panti)	360/thn	360/thn	360/thn	360/thn	360/thn
2	Lanjut Usia Terlantar (dalam panti)	180/thn	180/thn	180/thn	180/thn	180/thn
3	Anak Asuh (dalam panti)	155/thn	155/thn	155/thn	175/thn	17 5/thn
4	Penyandang Cacat (dalam panti)	150/thn	150/thn	150/thn	150/thn	150/thn
5	Eks Penyandang Penyakit Sosial (dalam panti)	40/thn	40/thn	40/thn	40/thn	40/thn
6	Keluarga Miskin	415 org				
7	Anak Asuh Panti Swasta	5000 org	4668 org	4700 org	4850 org	5000 org
8	Bencana Alam	15 KK				
9	Keluarga Miskin/Rentan	410 KK	415 KK	415 KK	415 KK	410 KK

APBN

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemberdayaan FM	3800 KK	4600KK	1600KK	1200KK	1200 KK
2	Pemberdayaan Keluarga	260 KK	160 KK	160 KK	160 KK	265 KK
3	Pemberdayaan KAT	570 KK	50 KK	111 KK	50 KK	277 KK

5	Pemberdayaan PSM	62 PSM	55 PSM	50 PSM	179 TKSK	158 TKSK
6	Pemberdayaan Orsos	30 Orsos	44 Orsos	51 Orsos	45 LKS	9 Orsos
7	Pemberdayaan KT	62 KT	49 KT	54 KT	50 KT	65 KT
8	K2KS	4 TMP, 7 rumah	3 TMP, 10 rumah	2 TMP	2 TMP	3 TMP
9	Pelayanan dan Perlindungan Kesos Anak	200 org	640 org	280 org	280 org	108 org
10	Lanjut Usia	52 org	30 org	100 org	50 org	70 org
11	Penyandang Cacat	30 org	360 org	360 org	200 org	50 org
12	Anak Cacat	-	-	-	-	-
13	Pelayanan dan Perlindungan Eks Napza	30 org	45 org	45 org	45 org	100 org
14	Anak Nakal	-	-	-	-	-
15	Rehabilitasi Tuna Sosial	115 org	123 org	120 org	120 org	110 org
16	Bencana Alam	210 org	280 org	240 org	200 org	88 KK
17	Perlindungan Sosial KTK- PM	60 org	30 org	40 org	30 org	106 org

Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, perlu didukung dengan beberapa Program / Kegiatan antara lain :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Dalam Program pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial melakukan Pelatihan/Bimbingan motivasi/keterampilan berusaha bagi keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan motivasi berusaha bagi keluarga miskin/tidak mampu dalam meningkatkan keterampilan berusaha serta menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan keluarga dengan mengembangkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera. Juga diadakan bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang di fokuskan di Kota Padang pada 4 Kecamatan dengan bantuan terhadap masyarakat miskin sebanyak 440 Orang.

- b. Sosialisasi Penguatan Peran Keluarga Masyarakat melalui Pos Pemberdayaan Keluarga.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu peran aktif Pos Pemberdayaan Keluarga yang memberikan motivasi dalam meningkatkan dan menumbuhkan usaha mikro dan kecil. Sebagai suatu usaha mengingatkan masyarakat bahwa tahun 2017

separuh dari orang miskin yang ada di nagari sudah meningkat taraf hidupnya. Pemberdayaan peran keluarga dengan membentuk kelompok-kelompok usaha ikut berperan aktif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

c. Pengadaan Beras untuk Panti swasta.

Pengadaan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga panti melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras dan telah didistribusikan kepada 124 panti sosial di 19 kab/kota untuk 4.000 orang anak yang berada dalam panti swasta dan masing-masing anak mendapat 400 gr beras selama 150 hari.

d. Melakukan Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan memanfaatkan bahan lokal yang sekaligus menjadi mata pencaharian sehingga dapat menuju kehidupan yang baik dan sejahtera pada masa yang akan datang.

Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah bisa tercapai secara maksimal.

e. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negatif pada masyarakat, diantaranya adanya kecenderungan semakin meningkatkan kuantitas maupun kualitas PMKS. Didasari bahwa hal ini merupakan tantangan kedepan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial semakin luas, serta mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat.

Adapun peluang yang ada yaitu berupa :

1. Dukungan dalam bentuk program dan kegiatan Askesos
2. Program Keluarga Harapan (PKH)
3. Program pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
4. Program Penanggulangan Bencana.
5. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin baik melalui panti maupun luar panti.
6. Program Peningkatan untuk masyarakat Pesisir dan Kepulauan.

Tantangan yang ada dapat berupa :

1. Konflik Sosial dalam masyarakat terhadap pencapaian Target dan Sasaran Kegiatan
2. Letak Geografis Kab/Kota

#### f. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-Isu Strategis yang dikumpulkan dari beberapa rapat berupa Hasil dari Forum Perangkat Daerah, Musrenbang dan Rekomendasi sebagai catatan strategis untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya akses PMKS terhadap pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data by name by address yang lengkap
- Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
- Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- Masih Banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan fasilitas bantuan jaminan sosial seperti askesos (BPJS)
- Pemberian bantuan kepada penyandang Disabilitas berupa bantuan UEP, bantuan untuk alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan lain mendukung penyandang disabilitas bisa mandiri dan berusaha.
- Bantuan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Bentuk KUBE sebagai pemberdayaan terhadap masyarakat miskin yang masih kurang merata

Dampak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Rancangan awal RKPD Dinas Sosial terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rancangan ini diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan dalam bentuk Program/Kegiatan yang akan diusulkan.

Dalam proses penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan analisa kebutuhan terhadap masing-masing Bidang dan UPTD sehingga didapat usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan. Usulan yang diberikan oleh Bidang dan UPTD tersebut setelah dilakukan inventarisasi ditemukan kegiatan baru dan perubahan nomenklatur kegiatan.

Untuk Rancangan Awal RKPD akan diusulkan beberapa kegiatan baru untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang telah ada. Hal ini mengacu kepada kewenangan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga ada tambahan 2 kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Sumatera Barat
2. Bimbingan Teknis Akreditasi Panti bagi Panti Disabilitas (LKS)

Sedangkan perubahan nomenklatur ada 1 buah kegiatan yaitu Sosialisasi kegiatan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS).

Review terhadap rancangan dapat dilihat dalam tabel T-C.31.

#### 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

Penelaahan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancangan awal RKPD dan sudah termasuk dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah sehingga kegiatan yang ada di Kabupaten/Kota sudah terakumulasi dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Dalam usulan tersebut merupakan akomodir dari usulan program pengentasan kemiskinan seperti tercantum dalam tabel T.C32 seperti kegiatan :

- a. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA
- b. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- c. Bimbingan Teknis Akreditasi Panti bagi Panti Disabilitas (LKS)
- d. Sosialisasi Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Sumatera Barat
- e. Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK

Kesemua usulan kegiatan tersebut dilakukan terkait pelimpahan kewenangan yang ada.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Sesuai dengan Tugas dan Pokoknya Kementerian Sosial RI bersama instansi yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dinas Sosial sebagai OPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPJM sebagai berikut:

Program prioritas dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan adalah :

1. Pengendalian terpadu penanganan kemiskinan
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan/nagari
3. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
5. Pemberdayaan Fakir Miskin
6. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial
7. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
8. Pembinaan Anak Terlantar
9. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks.Trauma
10. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
11. Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal

Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud :

1. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam
2. Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam

3. Perluasan lapangan kerja
4. Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan
5. Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro
6. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya dikelompokkan ke dalam Pelayanan Dasar sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah lebih cepat tercapai. Adapun urusan yang diberikan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat meliputi :

- Pemberdayaan Sosial
- Penanganan Warga Negera Migran Korban Perdagangan Orang
- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penanganan Bencana

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Penetapan Tujuan dan Sasaran dalam Renja ini diambil dari Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hasil Evaluasi terhadap tujuan dan sasaran adalah penurunan tingkat kemiskinan dan Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, terpencil/daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat.

#### **Tujuan**

Tujuan penetapan Renja ini diambil dari Tujuan yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah :

1. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

### **Sasaran Kegiatan**

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat Selama masa periode RPJMD tahap kedua (2016-2021), adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPJMD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam mencapai Visi dan Misi.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Faktor –Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

“Sesuai dengan pengalihan kewenangan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka program/kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Tugas dan Pokok serta Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Uraian Tugas”.

Program/kegiatan Renja Tahun 2021 meliputi sebagai berikut :

#### **1)Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Supir Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Logistik Kantor
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah
11. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
12. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

13. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:**
  1. Pengadaan Meubelier
  2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
  3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi
  5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
  6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
  7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
  8. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
  9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi dan Jaringan
  10. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
  11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Monumen
  12. Rehabilitasi Sedang/ Berat Monumen dan Bangunan Sejarah
  13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  14. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :**
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:**
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:**
  1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
  2. Penatausahaan Keuangan SKPD
  3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
  5. Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota
  6. Pengelolaan, Pengawasan, Pengendalian Asset SKPD

7. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan

**6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

1. Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)
3. Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial
4. Sosialisasi kegiatan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)
5. Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesos

**7) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan yaitu :**

1. Pengadaan Kelengkapan
2. Seleksi Penerimaan Calon Kelayan
3. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung)
4. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)
5. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang)
6. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)
7. Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)
8. Penyediaan bahan obat-obatan dan Jasa dokter
9. Penyediaan bahan pendidikan (Budi Utama)
10. Pengadaan makanan dan minuman
11. Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak
12. Sehari Bersama Anak
13. Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)

**8) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks.Trauma, yaitu :**

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang Disabilitas
2. Biaya makanan dan minuman kelayan
3. Penyediaan bahan obat-obatan dan Jasa dokter
4. Biaya kelengkapan kelayan

5. Pendayagunaan para penyandang Disabilitas
6. Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK
7. Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas
8. Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)
9. Bimbingan Teknis Akreditasi Panti bagi Penghuni Panti Disabilitas (LKS)
10. Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas
11. Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Disabilitas
12. Bimbingan Sosial bagi Pendamping Disabilitas
13. Penyusunan Perubahan Perda Disabilitas

**9) Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar, dengan kegiatan :**

1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti jompo
2. Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo
3. Biaya makanan dan minuman klien dan Panti Jompo
4. Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis
5. Biaya Jasa Penguburan / Pemulangan Klien
6. Lanjut Usia Berkreasi
7. Tanggap Darurat Terhadap Lanjut Usia Terlantar
8. Sosialisasi Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Sumatera Barat
9. Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK (Pendamping Lanjut Usia)
10. Penyusunan Perda Lanjut Usia

**10) Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan :**

1. Pengadaan kelengkapan (biaya klien)
2. Biaya obat-obatan dan Jasa Dokter
3. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyakit sosial
4. Pengadaan makanan dan minuman

**11) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba**

1. Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban Napza/HIV/AIDS
2. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV bagi PSKS
3. Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza

**12) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut :**

1. Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam Rangka Akreditasi
2. Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
3. Bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se-Sumatera Barat
4. Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tk Sumatera Barat
5. KSN Expo dan Award dalam HKSAN
6. Penguatan Nilai-Nilai KSN
7. Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)
8. Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
9. Penguatan Peran Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
10. Penguatan Peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesos
11. Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumatera Barat
12. Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat
13. Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat
14. Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial (FK-PSM) se-Sumbar
15. Pelatihan Dasar Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar
16. Pelatihan Lanjutan Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar

**13) Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan yaitu :**

1. Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)
2. Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3
3. Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)
4. Pelayanan Orang terlantar
5. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
6. Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
7. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil
8. Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT
9. Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional
10. Sumbar Expo (Publikasi)
11. Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS
12. Pembuatan Buku Data PMKS dan PSKS
13. Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Sumbar Expo)
14. Pembuatan Buku Panduan Pemutakhiran Data, Rapat Koordinasi, Bimtek Pemutakhiran Data dan Buku Data PPKS dan PSKS

#### **14) Program Penanganan Fakir Miskin**

1. Pengadaan Beras untuk Panti Swasta
2. Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi
3. Penumbuhan/Pengembangan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan
4. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2020
5. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan
6. Bantuan Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan
7. Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT
8. Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
9. Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM
10. Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pesisir dan Kepulauan

**15) Program Penanganan Bencana dan Bencana Sosial**

1. Sinergitas Pelaksana Program Keluarga Harapan
2. Rekonsiliasi Program Keluarga Harapan
3. Komplementaritas bantuan Program Keluarga Harapan
4. Peningkatan Capacity Building SDM PKH
5. Sosialisasi Program Bencana Sosial
6. Pemantapan Tim TRC Bencana Alam
7. Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam
8. Bantuan Logistik Bencana
9. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Alam
10. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial
11. Rakor Bencana Sosial
12. Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan
13. Pemantapan Pelopor Perdamaian

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 (Tabel T-C.33) terlampir.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu dalam pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa Program/Kegiatan yang diusulkan untuk Tahun 2020 yang belum tertampung dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021. Sehingga Usulan tambahan Program/Kegiatan tersebut akan diusulkan dalam Perubahan RPJMD dan Renstra serta penambahan dalam Usulan untuk Anggaran Tahun 2020. Dalam usulan tersebut sudah di masukkan ke dalam Renja Tahun 2020 sehingga program/kegiatan tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien. Ketidak sesuai antara Rancangan Awal RKPD tersebut dikarenakan ada nya kegiatan baru dan perubahan nomenklatur kegiatan.

Ketidaksesuaian Usulan Program/Kegiatan dalam Rancangan Awal Renja setelah di lakukan verifikasi dikarenakan adanya perubahan kewenangan dan menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2020 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian Kesejahteraan Sosial khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu
2	3	4	5	6	9	10
<b>SOSIAL</b>						
<b>DINAS SOSIAL</b>				<b>54.571.000.000</b>		<b>54.571.000.000</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Perkantoran</b>			<b>7.848.000.000</b>		<b>7.848.000.000</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat	Sumatera Barat	12 Bulan	107.519.400	12 Bulan	107.519.400
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Lisrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi	Sumatera Barat	12 Bulan	934.230.000	12 Bulan	934.230.000
Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Supir Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan, sopir dan pengaman kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	2.878.267.886	12 Bulan	2.878.267.886
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	182.091.190	12 Bulan	182.091.190
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan pengandaan yang menunjang operasional kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	95.785.650	12 Bulan	95.785.650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sumatera Barat	12 Bulan	123.680.302	12 Bulan	123.680.302
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Sumatera Barat	12 Bulan	421.557.200	12 Bulan	421.557.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Sumatera Barat	12 Bulan	58.216.000	12 Bulan	58.216.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Sumatera Barat	12 Bulan	336.460.844	12 Bulan	336.460.844
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti	Sumatera Barat	12 Bulan	2.375.449.528	12 Bulan	2.375.449.528

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	kegiatan OPD yang terpublikasikan	Sumatera Barat	12 Bulan	57.480.000	12 Bulan	57.480.000
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	Sumatera Barat	12 Bulan	96.822.000	12 Bulan	96.822.000
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman rapat yang terpenuhi	Sumatera Barat	12 Bulan	180.440.000	12 Bulan	180.440.000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>9.499.000.000</b>		<b>9.499.000.000</b>
Pengadaan Meubeleur	Jenis mebeluer yang dibeli	Sumatera Barat	288 Unit	621.342.500	288 Unit	621.342.500
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Komputer/Laptop atau software	Sumatera Barat	15 komputer, 9 laptop, 19 printer, 11 UPS	712.500.000	15 komputer, 9 laptop, 19 printer, 11 UPS	712.500.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jenis Alat Studio/Alat Komunikasi dan Alat Informasi yang terpelihara	Sumatera Barat	31 Unit	19.500.000	31 Unit	19.500.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	Sumatera Barat	1 Tahun	628.569.000	1 Tahun	628.569.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	kendaraan operasional/dinas yang terpelihara	Sumatera Barat	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	482.768.034	16 Unit Roda 4, 11 Unit Roda 2, 1 Roda 3	482.768.034
Pemeliharaan Rutin peralatan/ perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sumatera Barat	1 Tahun	54.920.000	1 Tahun	54.920.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jenis Komputer/laptop dan jaringan komputer Kantor yang terpelihara	Sumatera Barat	136 Unit	95.410.000	136 Unit	95.410.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	Sumatera Barat	Dinas dan 8 UPTD	5.012.489.466	Dinas dan 8 UPTD	5.012.489.466
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan Jaringan Kantor yang terpelihara	Sumatera Barat	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Sumatera Barat	1 Unit	22.462.000	1 Unit	22.462.000
Pemeliharaan sedang/berat bangunan monumen	Terlaksananya Pemeliharaan TMP Kusuma Negara Padang	Sumatera Barat	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Monumen dan Bangunan Sejarah	Terlaksananya Pemeliharaan TMP Kusuma Negara Padang	Sumatera Barat	1 Kegiatan	116.159.000	1 Kegiatan	116.159.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Sumatera Barat	1 Tahun	778.880.000	1 Tahun	778.880.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Sumatera Barat	2 Mobil, 2 Motor Roda 2	951.000.000	2 Mobil, 2 Motor Roda 2	951.000.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>230.000.000</b>		<b>230.000.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	pakaian Dinas PNS/non PNS	Sumatera Barat	272 Orang	230.000.000	272 Orang	230.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>81.000.000</b>		<b>81.000.000</b>

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	PNS yang mengikuti Bimtek	Sumatera Barat	4 Bimtek, 1 Sosialisasi	81.000.000	4 Bimtek, 1 Sosialisasi	81.000.000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>1.499.000.000</b>		<b>1.499.000.000</b>
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	Sumatera Barat	8 Dokumen	326.709.253	8 Dokumen	326.709.253
Penatausahaan Keuangan SKPD	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan Pengguna Anggaran dan pengelolaa keuangan OPD lainnya	Sumatera Barat	1 Tahun	556.685.545	1 Tahun	556.685.545
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP OPD, LPPD OPD, LKPJ OPD dan dokumen laporan lainnya	Padang	8 Dokumen	260.367.400	8 Dokumen	260.367.400
Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD	Terlaksananya Monev Program/kegiatan	Sumatera Barat	19 Lokasi	134.230.000	19 Lokasi	134.230.000
Penyusunan Sinergitas Program Antar Kab/Kota	Jumlah Peserta ikut penyusunan Sinergitas Program	Sumatera Barat	60 orang	-	60 orang	-
Pengelolaan, Pengawasan, Pengendalian Asset SKPD	Honorarium Pengelola Aset	Sumatera Barat	1 Tahun	199.370.000	1 Tahun	199.370.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan	Laporan Keuangan yang disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja	Padang	1 Kegiatan	21.637.802	1 Kegiatan	21.637.802
<b>Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba</b>	<b>Penjangkauan Pengguna Narkoba</b>	Sumatera Barat		<b>533.000.000</b>		<b>533.000.000</b>
Bimbingan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV	Meningkatnya Keterampilan dan Kepercayaan Diri Korban Napza / HIV	Sumatera Barat	20 orang	173.682.000	20 orang	173.682.000
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Bimtek Penanganan HIV Bagi PSKS	Meningkatnya Pengetahuan PSKS/Masyarakat tentang Penanggulangan Narkoba dan Pencegahan dan Penanganan HIV	Padang	207 Orang	156.857.300	207 Orang	156.857.300
Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza	Persamaan Persepsi antara Lembaga RBM dan Dinas Sosial dalam Penanganan Korban Napza	Sumatera Barat	55 orang	202.460.700	55 orang	202.460.700
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi</b>			<b>413.000.000</b>		<b>413.000.000</b>
Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terujuknya penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di Panti Rujukan	Sumatera Barat	12 Orang	127.200.000	12 Orang	127.200.000
Sosialisasi Program Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)	Telaksananya Sosialisasi program penanganan ABH	Sumatera Barat	50 Orang	138.437.200	50 Orang	138.437.200

Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Telaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial	Sumatera Barat	50 Orang	147.362.800	50 Orang	147.362.800
Sosialisasi kegiatan Unit Institusi Layanan Sosial (UILS)	Terlaksananya Sosialisai Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)	Padang	60 orang	-	60 orang	-
Sosialisasi kegiatan Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)	Terlaksananya Sosialisai Unit Informasi Layanan Sosial (UILS)	Padang	60 orang	-	60 orang	-
Penyusunan Peraturan Gubernur dan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesos	Terlaksananya Penyusunan Pergub dan Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesos	Sumatera Barat	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</b>			<b>10.647.000.000</b>		<b>10.647.000.000</b>
Biaya Pendidikan Klien (Tri Murni)	Terlaksananya Biaya Pendidikan untuk Klien Tri Murni	Sumatera Barat	100 orang	302.418.000	100 orang	302.418.000
Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak)	Terlaksananya Pertimbangan Izin dan Pengangkatan Anak	Sumatera Barat	25 Orang	175.953.900	25 Orang	175.953.900
Pengadaan Kelengkapan Klien	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan kelengkapan di panti	Sumatera Barat	255 orang	875.913.000	255 orang	875.913.000
Penyediaan Obat-obatan dan Jasa Dokter	Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	24.049.000	1 Tahun	24.049.000
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (Lb.Alung)	Jumlah anak terlantar laki-laki yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam panti	Sumatera Barat	160 orang	590.123.500	160 orang	590.123.500
Seleksi Penerimaan Calon Kelayan	Jumlah calon kelayan yang dapat diterima	Sumatera Barat	355 Orang	164.977.000	355 Orang	164.977.000
Penyediaan Bahan Pendidikan (Budi Utama)	Jumlah anak asuh laki-laki yang terpenuhi biaya pendidikan dan berada dalam panti	Sumatera Barat	75 orang	205.440.000	75 orang	205.440.000
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Budi Utama)	Jumlah anak dalam panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	Sumatera Barat	75 orang	244.275.000	75 orang	244.275.000
Rapat Koordinasi Pelayanan Rehabilitasi Kesos Anak	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tentang Rehabilitasi Sosial Anak	Dinas Sosial	125 orang	505.789.776	125 orang	505.789.776
Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah anak terlantar yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti	Sumatera Barat	355 orang	4.595.956.396	355 orang	4.595.956.396
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan)	Jumlah anak terlantar perempuan yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam panti	Sumatera Barat	100 orang	984.313.628	100 orang	984.313.628
Sehari Bersama Anak	Terlaksananya Penyelenggaraan Sehari Bersama Anak	Dinas Sosial	200 orang	1.525.152.600	200 orang	1.525.152.600
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (Tri Murni)	Jumlah anak asuh perempuan dalam panti yang memperoleh pendidikan dan pelatihan	Sumatera Barat	100 orang	452.638.200	100 orang	452.638.200
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan</b>			<b>4.709.000.000</b>		<b>4.709.000.000</b>

Eks.Trauma	pelayanan dan keterampilan					
Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Jasa Dokter	Terlaksananya penyediaan bahan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	21.706.000	1 Tahun	21.706.000
Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK)	Terlaksananya bimbingan dan Pelatihan keterampilan terhadap penyandang Disabilitas melalui LBK	Sumatera Barat	15 Orang	-	15 Orang	-
Bimbingan Teknis Akreditasi Panti bagi Penghuni Panti Disabilitas (LKS)	Meningkatnya pengetahuan pengurus/pengelola panti (LKS) tentang penyelenggaraan bagi panti (LKS)	Sumatera Barat	56 Orang	-	56 Orang	-
Biaya Kelengkapan Kelayan	Jumlah penyandang cacat dalam panti yang mendapatkan kelengkapan harian	Sumatera Barat	150 orang	330.350.000	150 orang	330.350.000
Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh yang peduli kepada Penyandang Disabilitas	Sumatera Barat	58 Orang	162.500.000	58 Orang	162.500.000
Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat retardasi mental dalam panti yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan	Sumatera Barat	100 orang	486.575.200	100 orang	486.575.200
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam panti	Sumatera Barat	85 orang	520.779.000	85 orang	520.779.000
Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas	Sumatera Barat	1 Kegiatan	378.111.660	1 Kegiatan	378.111.660
Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK	Sumatera Barat	68 Orang	-	68 Orang	-
Biaya Makan dan Minuman Kelayan	Jumlah penyandang cacat yang memperoleh makanan dan minuman	Sumatera Barat	150 orang	2.079.318.140	150 orang	2.079.318.140
Bimbingan Sosial Pendampingan Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi Pendamping Disabilitas yang berada di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	68 orang	240.460.000	68 orang	240.460.000
Penyusunan Perubahan Perda Disabilitas	Tersusunnya Perubahan Perda Disabilitas	Sumatera Barat	1 Perda	200.000.000	1 Perda	200.000.000
Rapat Koordinasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Disabilitas	Jumlah Peserta Rakor	Sumatera Barat	60 Orang	289.200.000	60 Orang	289.200.000
<b>Program Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar</b>	<b>Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan keterampilan</b>			<b>4.585.000.000</b>		<b>4.585.000.000</b>
Penyediaan Bahan Obat-obatan dan Alat-alat Dokter Pakai Habis	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	58.514.000	1 Tahun	58.514.000
Biaya Jasa Penguburan/ Pemulangan Klien	Jumlah panti lanjut usia terlantar yang dapat dipulangkan dan	Sumatera Barat	2 UPTD	37.000.000	2 UPTD	37.000.000

	memperoleh penguburan					
Lanjut Usia Berkreasi	Terlaksananya kegiatan lanjut usia berkreasi	Sumatera Barat	250 orang	230.646.934	250 orang	230.646.934
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	Sumatera Barat	180 orang	745.194.028	180 orang	745.194.028
Biaya Kelengkapan Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	Sumatera Barat	180 orang	486.323.420	180 orang	486.323.420
Biaya Makanan dan Minuman Klien di Panti Jompo	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bahan kelengkapan harian dalam panti	Sumatera Barat	180 orang	2.365.963.256	180 orang	2.365.963.256
Sosialisasi Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Sumatera Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Lanjut Usia terlantar di Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 Orang	153.863.600	50 Orang	153.863.600
Tanggap Darurat Terhadap Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Tanggap Darurat terhadap Lansia	Sumatera Barat	50 Orang	-	50 Orang	-
Bimbingan Sosial bagi PSM/TKSK/Pendamping Lanjut Usia	Jumlah Peserta Bimbingan	Sumatera Barat	50 Orang	277.654.162	50 Orang	277.654.162
Penyusunan Perda Lanjut Usia	Tersusunnya Perda Lanjut Usia	Sumatera Barat	1 Perda	229.840.600	1 Perda	229.840.600
<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan, bimbingan dan pelatihan dalam panti dan luar panti</b>	Sumatera Barat		<b>1.337.000.000</b>		<b>1.337.000.000</b>
Pengadaan Kelengkapan (biaya klien)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh biaya kelengkapan harian dalam panti	Sumatera Barat	40 orang	253.760.000	40 orang	253.760.000
Biaya obat-obatan dan Jasa Dokter	Terlaksananya pengadaan obat-obatan	Sumatera Barat	1 Tahun	12.065.000	1 Tahun	12.065.000
Pengadaan Makanan dan Minuman	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh makanan dan minuman dalam panti	Sumatera Barat	40 orang	576.323.256	40 orang	576.323.256
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam panti	Sumatera Barat	40 orang	494.851.744	40 orang	494.851.744
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah Lembaga, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan</b>			<b>3.518.000.000</b>		<b>3.518.000.000</b>

Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas Bagi Pengurus KT se-Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	84.458.000	50 orang	84.458.000
Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) berprestasi Tk.Sumbar	Terlaksananya Penilaian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (KT, Orsos, PSM dan TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat	Sumatera Barat	52 orang	166.102.400	52 orang	166.102.400
Pertemuan Forum Komunikasi PSM Se-Sumbar	Terlaksananya Pertemuan FK-PSM se-Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	51.007.999	50 orang	51.007.999
Bimbingan Kapasitas bagi TKSK se-Sumbar	Terlaksananya Bimbingan Kapasitas Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	149.545.000	50 orang	149.545.000
KSN Expo dan Award dalam HKS	Terlaksananya keikutsertaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran KSN Expo dan Awards	Sumatera Barat	1 kegiatan	295.108.000	1 kegiatan	295.108.000
Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terlaksananya Pelatihan Lanjutan bagi PSM yang telah mengikuti pelatihan dasar	Sumatera Barat	38 orang	96.489.000	38 orang	96.489.000
Pelestarian Nilai-Nilai KSN	Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai KSN Tingkat provinsi	Sumatera Barat	1 kegiatan	396.942.700	1 kegiatan	396.942.700
Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN)	Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai KSN Tingkat provinsi	Sumatera Barat	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
Bimbingan Jejaring kerja LKS / orsos se Sumbar dalam rangka akreditasi	Terlaksananya Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Organisasi Sosial se Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi	Sumatera Barat	50 orang	99.286.700	50 orang	99.286.700
Penguatan Peran LKS Posdaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kessos	Terlaksananya Penguatan Peran LKS Posdaya di Kab/Kota	Sumatera Barat	900 orang	361.578.000	900 orang	361.578.000
Penguatan Kelembagaan LKKS Provinsi dan Kab/Kota Sumatera Barat	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan LKKS Prov dan Kab/Kota Sumatera Barat	Sumatera Barat	180 orang	551.739.000	180 orang	551.739.000
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya penyuluhan sosial melalui penyuluhan sosial keliling dan berbagai media	Sumatera Barat	30 Orang	666.131.201	30 Orang	666.131.201
Forum Komunikasi Pengurus Karang Taruna se-Sumbar	Terlaksananya pertemuan bagi Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	56.584.000	50 orang	56.584.000
Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumbar	Terlaksananya Pelatihan Dasar PSM	Sumatera Barat	50 orang	96.279.000	50 orang	96.279.000
Penguatan Peran Pilar Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah peserta kegiatan penguatan peran pilar sosial dalam penyelenggaraan kesos	Sumatera Barat	180 Orang	-	180 Orang	-

Bimbingan Pengurus organisasi sosial se-Sumatera Barat	Terlaksananya Bimbingan bagi pengurus Organisasi Sosial se Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 orang	57.324.000	50 orang	57.324.000
Penguatan Peran LKS dalam Penyelenggaraan Kesos	Terlaksananya Peran LKS berbasis Masyarakat	Sumatera Barat	180 orang	389.425.000	180 orang	389.425.000
<b>Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Jumlah yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan</b>			<b>1.692.000.000</b>		<b>1.692.000.000</b>
Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT	Terlaksananya Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan KAT	Kab. Mentawai	1 Rekomendasi	114.416.400	1 Rekomendasi	114.416.400
Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional	Terlaksananya persiapan calon Pahlawan Daerah	Padang	3 Orang	105.316.000	3 Orang	105.316.000
Pelayanan Orang terlantar	Terlaksananya Pemulangan Orang Terlantar di Sumatera Barat	Sumatera Barat	38 orang	35.650.630	38 orang	35.650.630
Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Sumbar Expo)	Ikut sertanya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan Sumbar Expo serta Tersedianya Jasa Informasi dan Publikasi	Padang	1 Kegiatan	271.100.850	1 Kegiatan	271.100.850
Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan LK3 bagi pengurus LK3 di 19 kab/kota	Sumatera Barat	50 Orang	-	50 Orang	-
Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Komunitas Adat Terpencil	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil	Kab. Mentawai	30 KK	82.152.410	30 KK	82.152.410
Bimbingan Teknis Pemantapan Petugas Pendata PMKS	Terlaksananya bimbingan teknis pemantapan petugas pendata PMKS dan PSKS	Padang	179 Orang	-	179 Orang	-
Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB)	Terlaksananya Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah	Sumatera Barat	30 orang	-	30 orang	-
Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Terlaksananya Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Sumatera Barat	30 Orang	-	30 Orang	-
Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Terlaksananya Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga Rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Sumatera Barat	30 Orang	673.106.875	30 Orang	673.106.875
Pembuatan Buku Panduan Pemutakhiran Data, Rapat Koordinasi, Bimtek Pemutakhiran Data dan Buku Data PPKS dan PSKS	Terlaksananya Buku Panduan Pemutakhiran Data, Rapat Koordinasi, Bimtek Pemutakhiran Data dan Buku Data PPKS dan PSKS	Padang	100 Buku	312.766.835	100 Buku	312.766.835

Bimbingan Motivasi Sosial/keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS)	Terlaksananya bimbingan sosial keluarga dan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga rentan miskin	Sumatera Barat	40 Orang	97.490.000	40 Orang	97.490.000
<b>Program Penanganan Fakir Miskin</b>	<b>Jumlah Fakir Miskin yang dapat ditangani</b>			<b>6.786.000.000</b>		<b>6.786.000.000</b>
Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi BDT Kab/ Kota	Sumatera Barat	60 Orang	114.246.000	60 Orang	114.246.000
Pengadaan Beras untuk Panti Swasta	Jumlah anak panti swasta se Sumatera Barat yang mendapatkan bantuan beras	Sumatera Barat	4000 orang	3.753.357.643	4000 orang	3.753.357.643
Bimbingan Pemantapan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Terlaksananya Bintap BPNT	Sumatera Barat	60 orang	119.553.309	60 orang	119.553.309
Seleksi dan Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi	Terlaksananya seleksi KUBE dan pendamping berprestasi tingkat provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	19 orang	176.994.100	19 orang	176.994.100
Bantuan Pengembangan E Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM	Terlaksananya Bantuan E-Warong dan KUBE Jasa	Sumatera Barat	7 KLP	544.000.000	7 KLP	544.000.000
Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan	Terlaksananya Bantuan KUBE untuk Pesisir dan Kepulauan	Sumatera Barat	8 KLP	334.231.800	8 KLP	334.231.800
Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai dan RASTRA Tahun 2020	Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan BNTN/RASTRA Provinsi dengan Tim Koordinasi BPNT/RASTRA Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	Sumatera Barat	50 Orang	294.718.000	50 Orang	294.718.000
Bantuan Penumbuhan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Pedesaan	Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Sumatera Barat	5 KLP	1.272.675.748	5 KLP	1.272.675.748
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pedesaan	Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pendamping KUBE dan fasilitator pemberdayaan fakir miskin	Sumatera Barat	50 Orang	86.879.900	50 Orang	86.879.900
Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE PFM Pesisir dan Kepulauan	Terlaksananya Bimbingan Pemantapan	Sumatera Barat	50 Orang	89.343.500	50 Orang	89.343.500
<b>Program Penanganan Korban Bencana dan Bencana Sosial</b>	<b>Jumlah Korban Bencana yang mendapat kebutuhan dasar dan pemulihan trauma</b>			<b>1.194.000.000</b>		<b>1.194.000.000</b>
Bantuan Logistik Bencana	Terlaksananya Pengadaan Bantuan Logistik Bencana Alam	Sumatera Barat	1 Kegiatan	192.246.825	1 Kegiatan	192.246.825
Rakor Bencana Sosial	Terlaksananya Rakor Bencana Sosial Tk. Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	62 Orang	95.024.200	62 Orang	95.024.200

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Logistik Bencana Sosial	Terlaksananya Penyusunan Logistik Bencana Sosial	Sumatera Barat	50 Orang	-	50 Orang	-
Pemantapan Pelopor Perdamaian	Terlaksananya Pemantapan Pelopor Perdamaian	Sumatera Barat	60 Orang	90.373.200	60 Orang	90.373.200
Rakor Koordinasi Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Koordinator PKH dan terlaksananya monitoring kegiatan PKH di Tingkat Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	35 orang	95.896.500	35 orang	95.896.500
Pemantapan Tim TRC Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan TRC Bencana Alam	Sumatera Barat	1 Kegiatan	97.359.600	1 Kegiatan	97.359.600
Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam	Sumatera Barat	1 Kegiatan	98.631.400	1 Kegiatan	98.631.400
Sosialisasi Program Bencana Sosial	Terlaksananya Sosialisasi Program Bencana Sosial	Sumatera Barat	1 Kegiatan	90.418.000	1 Kegiatan	90.418.000
Sinegritas Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Sinegritas Pelaksana PKH	Sumatera Barat	76 Orang	89.819.500	76 Orang	89.819.500
Peningkatan Capacity Building SDM PKH	Terlaksananya Peningkatan Capacity Building SDM Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	76 Orang	109.651.000	76 Orang	109.651.000
Komplementaritas bantuan Program Keluarga Harapan	Terlaksananya Komplementaritas Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	48 Orang	96.450.775	48 Orang	96.450.775
Rekonsiliasi Program Keluarga Harapan	Terlaksananya rekonsiliasi bantuan Program Keluarga Harapan	Sumatera Barat	55 Orang	138.129.000	55 Orang	138.129.000

## BAB V

### PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang terukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja tahun 2020, diharapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sehubungan dengan pelaksanaan anggaran kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018, beberapa hal yang menjadi catatan penting :

1. Kondisi Sumatera Barat yang rawan bencana, untuk mengantisipasi perlu adanya kesiapsiagaan dari petugas dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat (emergency) bencana.
2. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. Berkaitan dengan hal tersebut kewenangan menurut SPM untuk Provinsi yaitu Rehabiltasi Sosial Dasar yang berada di dalam panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup Provinsi, sedangkan untuk Kab/Kota berada di luar panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup Kab/Kota. Perlu adanya penekanan untuk pelaksanaan SPM pada masing-masing Pemerintah Daerah.

**Rencana Tindak Lanjut**

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan
2. Penyiapan UPTD dalam rangka pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban trafiking, korban penelantaran dan eksploitasi anak serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum serta melakukan revitalisasi terhadap UPTD yang akan melaksanakan pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud (UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Harapan Padang Panjang).

**Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.
- b. Mempedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Padang, 18 Desember 2019

Kepala Dinas Sosial  
Provinsi Sumatera Barat



**Jumaidi, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19670817 200003 1 006